



# ORGANIZE

## Journal of Economics, Management and Finance

Vol. 2 No. 1 (2023) ISSN: 2963-0576

Journal website: <https://organize.pdfaii.org/>

Research Article

## Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarman Azwar Karim

Khairul Wahid, Binti Mutafarida, Andriani

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Copyright © 2023 by Authors, Published by ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Desember 21, 2022

Revised : January 26, 2023

Accepted : February 09, 2023

Available online : March 19, 2023

**How to Cite:** Khairul Wahid, Binti Mutafarida, & Andriani. (2023). Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarman Azwar Karim. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 50-63. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.6>

Corresponding Author, Email: [khairulwahid@gmail.com](mailto:khairulwahid@gmail.com) (Khairul Wahid)

### Comparative Analysis of Islamic Economic Development Thought KH. Ma'ruf Amin and Adiwarman Azwar Karim

**Abstract.** This research is a library research with qualitative data and analysis with descriptions and analysis of research objects by reading and examining the works of figures or the thoughts of figures and other sources related to the topic, which are then analyzed and summarized. This study applies content analysis by means of comparison. Furthermore, regarding the thought of Islamic economic development initiated by KH. Ma'ruf Amin has three views (justice economy, community economy and self-reliance economy). In addition to efforts to provide access to capital, increase competency and capability, as well as expand access to the market. Meanwhile, Adiwarman Azwar Karim observes an Islamic economic development emphasizing the principle of monotheism as the key to development. Furthermore, he emphasizes the principle of justice in order to create a just and prosperous society, support healthy competition and fairness, and play an active role in the global and regional economy by relying on skills and the potential of the nation. But the emphasis and methods used by the two

figures are different. In substance, the thoughts of the two figures are relevant to the ideals of economic development in Indonesia. In Indonesia, development is carried out on the basis of the basic foundation of the state, namely Pancasila.

**Keywords:** Islamic Economic Development, KH. Ma'ruf Amin, Adiwarmar Azwar Karim

**Abstrak.** Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan data dan analisa kualitatif dengan deskripsi dan analisa objek penelitian dengan membaca dan menelaah karya tokoh atau pemikiran tokoh serta sumber lain yang berkaitan dengan topik, yang kemudian dianalisa dan diambil ringkasan. Penelitian ini menerapkan konten analisa dengan cara mengkomparasi. Selanjutnya, berhubungan pemikiran pembangunan ekonomi islam yang dicetus oleh KH. Ma'ruf Amin mempunyai tiga pandangan (ekonomi keadilan, ekonomi keumatan dan ekonomi berkemandirian). Selain itu upaya pemberian jalan masuk modal, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, serta perluasan jalan masuk pasar. Sedangkan Adiwarmar Azwar Karim mengamati suatu pembangunan ekonomi islam menekankan prinsip tauhid sebagai kunci dari pembangunan, Selanjutnya beliau menekankan pada prinsip keadilan agar dapat menjadikan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, mensupport kompetisi sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bergantung pada kecakapan serta potensi bangsa. Tapi penekanan dan cara-cara yang dilakukan oleh kedua tokoh memiliki perbedaan. Secara substansi pemikiran kedua tokoh tersebut relevan dengan cita-cita pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia pembangunan yang dilakukan dengan berdasar pada landasan dasar negara ialah Pancasila.

**Kata kunci:** Pembangunan Ekonomi Islam, KH. Ma'ruf Amin, Adiwarmar Azwar Karim

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, cita-cita suatu bangsa adalah untuk mencapai kondisi sosial yang ideal: masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial bagi semua golongan. Keadaan ini membuat pemerintah akuntabel kepada bangsa, dan pemerintah memiliki tugas untuk membangun bangsa menuju keadaan yang lebih baik, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur yang ada (Hasan & Muhammad, 2018). Padahal pembangunan nasional harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen negara: pemerintah dan masyarakat.

Konsep pembangunan biasanya sangat dekat dengan konteks perubahan dalam arti pembangunan adalah perubahan yang terencana dan sistematis. Individu dan kelompok tentu akan mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik, sekalipun ingin menjadi sempurna. Mencapai ini pasti akan membutuhkan lebih banyak perencanaan berdasarkan pendekatan yang rasional dan logis. Hal ini memungkinkan semua elemen dalam suatu bangsa (pemerintah dan masyarakat) bekerja sama menuju kemakmuran dan kesejahteraan (Purba, Bonaraja, et al., 2021).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu bangsa bagi kelangsungan hidup masyarakat. Indikator rencana pembangunan ekonomi dapat dibaca dari pencapaian tujuan tertentu seperti: Pertumbuhan ekonomi negara, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran dan kemiskinan turun. Saat ini, masyarakat Indonesia telah memiliki banyak kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Salah satu batu sandungan mendasar yang masih belum terselesaikan adalah kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, sehingga membutuhkan para ahli dan praktisi untuk lebih mbingkai ulang strategi pembangunan yang relevan agar dapat

bertahan di Indonesia. Harapannya, tidak ada lagi orang yang terpinggirkan, tertindas, tertindas atau dirugikan oleh sistem ekonomi yang ada (Almizan, A., 2016).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu bangsa bagi kelangsungan hidup masyarakat. Indikator rencana pembangunan ekonomi dapat dibaca dari pencapaian tujuan tertentu seperti: Pertumbuhan ekonomi negara, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran dan kemiskinan turun. Saat ini, masyarakat Indonesia telah memiliki banyak kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Saya belum bisa mendapatkan hasil apapun. Salah satu batu sandungan mendasar yang masih belum terselesaikan adalah kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat, sehingga membutuhkan para ahli dan praktisi untuk lebih membingkai ulang strategi pembangunan yang relevan agar dapat bertahan di Indonesia. Harapannya, tidak ada lagi orang yang terpinggirkan, tertindas, tertindas atau dirugikan oleh sistem ekonomi yang ada.

Pada masa pemerintahannya saat ini, Indonesia telah menggunakan konsep pembangunan ekonomi syariah berbasis kerakyatan. Hal itu didasarkan pada Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun ke depan (2005-2025). Selanjutnya, konsep utama pengembangan ekonomi syariah yang masuk dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 terkait dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan pada sektor UMKM-nya, wisata halal dan perbankan syariah, yang dicanangkan sebagai indikator kunci. dijelaskan. Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, 2018). Kerangka ini sejalan dengan misi besar Indonesia dan konsep pembangunan ekonomi KH. Maruf Amin.

KH. Ma'ruf Amin adalah cendekiawan Muslim terkenal dan profesor ekonomi Islam, dengan keahlian khusus di bidang ekonomi Syariah. Di kepalanya terbesit ide konsep "*new present economy*" Indonesia. Konsep ekonomi yang dikembangkan antara lain: Mengutamakan orientasi keadilan, ekonomi kerakyatan/kerakyatan, konsep kemitraan, dan moral yang tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat konsep tersebut merupakan hasil dari perwujudan nilai-nilai luhur ekonomi Islam, dan diharapkan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia akan menciptakan tatanan ekonomi nasional yang lebih cerah dan masyarakat yang sejahtera.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan prestasi para pemikir ekonomi Islam. Mereka tidak hanya menyumbangkan gagasan-gagasan besar tentang ekonomi syariah, tetapi juga komitmen mereka terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Salah satu dari banyak yang terkenal adalah Adhiwarman Azwar Karim. Adhiwarman Azwar Karim juga termasuk dalam kategori pemikir Islam fundamentalis karena ia adalah salah satu sarjana Islam yang mengkhususkan diri pada ekonomi Islam. Jika penulis membaca karyanya, setidaknya ada beberapa pendekatan dan metode yang digunakannya dalam membangun ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakannya dapat dibagi menjadi pendekatan sejarah, fikih, dan ekonomi (Firda Zulfa, 2015).

Pendekatan kesejarahannya sangat kental dalam berbagai tulisannya. Dalam setiap tulisannya (khususnya buku), Adiwarmar Azwar Karim selalu berusaha menjelaskan fenomena ekonomi modern dengan mengacu secara khusus pada sejarah Islam klasik pada masa Nabi. Selain itu, ia juga mengkolaborasikan gagasan-gagasan para cendekiawan Muslim klasik yang penting dan berusaha merefleksinya dalam konteks kekinian, tentunya dari sudut pandang ekonomi. ia juga menggunakan pendekatan fikih (Karim, Adiwarmar, 2001).

Definisi ekonomi Islam yang paling umum selama ini adalah "ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah". Sering kali definisi seperti itu tidak disertai dengan penjelasan yang lengkap sehingga menimbulkan kesan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang terbungkus dalam dalil-dalil dari ayat atau hadits tertentu. Penjelasan "sebagaimana adanya" bukanlah jawaban yang memuaskan. Karena ekonomi konvensional bisa disebut Islami asalkan bisa dipertanggung jawabkan dengan ayat-ayat tertentu. Dan inilah yang disebut Adiwarmar Aswar Karim dengan paksaan berpuisi. Menurutnya, ekonomi Islam diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, tiang dan atap (Karim, Adiwarmar, 2001). Menyadari hal ini, ia menawarkan pemahaman tentang ekonomi Islam yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang beliau maksud adalah *tauhid* (keesaan), *adl* (keadilan), *khilafah* (pemerintahan), *nubuwwah* (kenabian) dan *ma'ad* (return) (Firdausi & Herianingrum, 2020).

Kebangkitan para pemikir ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan ekonomi Islam, telah menimbulkan respon positif yang telah membantu upaya pengembangan dan perbaikan sistem ekonomi Islam di negara-negara Muslim dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam mengembangkan dan menyempurnakan, perlu dilakukan investigasi dan verifikasi atas pemikiran para ahli dan pemikir ekonomi Islam yang digunakan atau dirujuk secara luas di setiap negara. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji pemikiran pembangunan ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmar Azwar Karim membandingkan kedua angka tersebut karena pemikiran kedua tokoh ekonomi Islam tersebut dinilai masih relevan dengan penelitian, pengembangan dan pembaharuan pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan judul penelitian ini: "Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarmar Azwar Karim".

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pembangunan Ekonomi Islam**

#### **a. Konsep pembangunan ekonomi Islam**

Dalam khazanah keilmuan peradaban Islam, perkembangan ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan kemakmuran planet ini. Menurut Ibnu Khaldun, perkembangan itu terkait erat dengan Umran al-'alamnya. Istilahnya adalah *mainstream social, civic, dan urban* (dalam arti luas). Penafsiran yang lebih luas di atas adalah bahwa pembangunan yang dimaksud tidak hanya menyangkut pembangunan fisik alam, tetapi juga pembangunan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia dan

di akhirat. adalah. Rasulullah juga menetapkan dasar pengembangan ruh dunia dan akhirat, yaitu akhlak dan iman sebagai landasan utama, ruh kerja.

Dalam usahanya membangun peradaban, Nabi meletakkan dasar-dasar sebagai berikut: Pertama, pembangunan masjid sebagai pusat peradaban (tidak hanya sebagai fungsi ibadah, tetapi juga sebagai aktivitas *muamalah*). Kedua, menjalin hubungan baik antara kaum Ansar dengan kaum pendatang dalam pengembangan perdagangan dan pertanian. Ketiga, mengadopsi kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat untuk menjamin kehidupan yang aman dan damai. Keempat, mendirikan *baitul mall* sebagai pusat dalam pengelolaan dasar keuangan negara, nantinya hasil dari pengelolaan dana tersebut untuk pembangunan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan (Euis, Amalia, 2010).

b. Prinsip pembangunan Islam

Di dalam Islam pandangan hidup didasarkan atas pada konsep yang fundamental, yaitu: *tauhid uluhiyah*, *rububiyah*, *khalifah*, *tazkiyah an-nas*, *falah* dan *'adalah* (keadilan). Prinsip tauhid *uluhiyah* menekankan keimanan kepada Allah, dan segala sesuatu di alam adalah milik Allah. Selama pengembangan, ia memiliki sumber daya yang ada dan menggunakannya tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan sosial. Tauhid *rububiyah* mengajarkan bahwa Allah menentukan sukses dan berhasilnya suatu perjuangan. Upaya pembangunan manusia harus mengakui bahwa tujuan dapat dicapai melalui upaya manusia dengan bantuan ilahi.

Pada prinsipnya, manusia diciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah (wakil Tuhan). Merupakan perintah Tuhan untuk selalu menjaga bumi dan menggunakan segala sumber daya yang ada secara bertanggung jawab dan patut diteladani bagi manusia dan makhluk hidup. Manusia sebagai agen perubahan dalam masyarakat harus memiliki orientasi sosial yang baik. Namun, dalam konteks kebaikan pertanyaan itu, pasti ada hubungannya dengan Alfred. Kebaikan itu penting bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tapi juga sebagai upaya persiapan menuju akhirat. Tetapi semua prinsip ini, tanpa keadilan sosial-ekonomi, hanyalah prinsip tanpa arah (Tohir, Moh., 2018).

c. Tujuan Islam

Kemakmuran seluruh umat manusia (*falah*) adalah tujuan utama Islam dalam komitmennya terhadap persatuan dan keadilan. Karena kegembiraan dan kebahagiaan spiritual (*batin*) hanya dapat dicapai melalui kebutuhan material dan spiritual setiap individu, maka salah satu alat untuk mengukur kebahagiaan adalah kepuasan fisik. Transformasi harus diimbangi dengan bisnis yang menjamin kewarasan. Ini menunjukkan hati manusia, keadilan dan permainan yang adil dalam semua interaksi manusia. Perkembangan tersebut sejalan dengan Islam dalam tujuan Syariah (*Maqasid Syariah*).

Pemuasan kebutuhan spiritual menekankan perkembangan moral, kegembiraan kecukupan material berdasarkan perkembangan manusia, dan pola sumber daya material yang adil, sehingga semua kebutuhan manusia terpenuhi sepenuhnya dan pendapatan properti didistribusikan. akan adil. Karena sudah menjadi kewajiban komunal bagi masyarakat (*umat Islam*) untuk memberikan pembinaan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena salah satu prinsip

syariah melarang merugikan orang lain dan merugikan satu sama lain, keduanya sangat berbahaya dan merupakan tugas individu dan kolektif untuk mencegahnya (Zulfa, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan menurut jenis penelitiannya. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bahan buku dan bahan kepustakaan lain yang relevan dengan pembahasan (Hadi, Sutrisno, 2004). Pendekatan yang dipilih adalah analisis deskriptif. Merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif dan sistematis tentang data dan fakta dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, untuk sampai pada pemahaman dan mencapai interpretasi dari data yang dianalisis (Kaelan, M. S., 2005). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan konkrit tentang pemikiran pembangunan ekonomi islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmar Azwar Karim.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin**

Ma'ruf Amin atau lebih dikenal dengan sebutan ulama bernama KH. Ma'ruf Amin adalah tokoh agama, politikus dan dosen yang lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943. Ia belajar di Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah di Kresek, Tangerang (1955). Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pesantren Tebuireng, Jombang (1958 -1961). Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Jawa Barat. Setelah belajar di universitas, ia melanjutkan pekerjaan dakwahnya yang berlangsung di Jakarta.

KH. Ma'ruf Amin menerima penghargaan doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) yang diberikan oleh Prof. Dr. Komarudin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tanggal 5 Mei 2012. Gelar tersebut layak diberikan kepada Ma'ruf Amin karena beliau adalah seorang ulama' yang sangat brilian dalam bidang Ekonomi Islam dan juga merupakan penggerak ekonomi Islam Indonesia. Sementara itu KH. Ma'ruf Amin diberi gelar guru besar atau guru besar Ekonomi Muamalat Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pemberian gelar ini dilakukan pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) melalui sidang terbuka pada Rabu, 24 Mei 2017.

Dalam konsep yang diperkenalkannya, Marhu Amin berpijak pada tiga prinsip: keadilan, keumatan dan kedaulatan. Dengan landaskan dari tiga prinsip kesatuannya dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat. Konsep keadilan didasarkan pada nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan ekonomi moral dengan semangat kemanusiaan. Perekonomian nasional juga dilandasi oleh semangat kerakyatan (demokrasi ekonomi) dan arahnya ditujukan kepada rakyat. Prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada kemitraan, solidaritas, dan musyawarah. Terakhir, kemandirian atau kedaulatan ekonomi, yang meliputi semangat nasionalisme ekonomi dengan

menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019).

a. Ekonomi berkeadilan

Keadilan adalah prinsip pertama pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin. Mengutip Bung Hatta, keadilan merupakan kesetaraan dan hilangnya kezaliman (Sasono, Adi, 2008). Dalam artian setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara. Namun, hal ini berbeda dengan paham liberalisme yang memperlakukan kaya dan miskin secara setara, yang cenderung digeneralisasikan terlepas dari konteks sosial. Pentingnya keadilan saja tidak cukup untuk menjaga kesetaraan. Yang lemah juga perlu dilindungi agar tidak diintimidasi.

b. Ekonomi keumatan

Ketika masyarakat miskin produktif (usaha mikro) menerima modal dan dukungan, mereka dapat memperkuat perekonomian. Dengan latar belakang ini, sosio-ekonomi adalah ekonomi kerakyatan yang berpusat pada manusia. Perkembangan dan kemajuan membutuhkan dorongan. Kunci keberhasilan China dalam membangun ekonominya adalah membangunnya dari nol. Dia mampu keluar dari bayang-bayang pengusaha Soviet dan bertekad untuk membangun ekonomi (pertanian) (Mubyarto, 1998).

Semangat ekonomi kerakyatan diwujudkan dengan membangun perekonomian dari bawah ke atas. Berbeda dengan kapitalis yang mendapat untung dari prinsip persaingan, ekonomi pada dasarnya memilih untung dengan bekerja sama dan memakmurkan. Selain itu, keadilan adalah tujuan ekonomi publik. Pertumbuhan yang mampu dicapai lebih eksponensial dan *sustainable* (berkelanjutan). Hal ini jelas berbeda ketika melakukan pembangunan ekonomi dengan *trickle-down effect* yang bertitik tumpu pada konglomerat (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019).

c. Ekonomi berkemandirian

Kontribusi usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian nasional sangat besar, bahkan dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian nasional. Ada beberapa alasan mengapa UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Pertama, UMKM didominasi oleh manusia. Kedua, diperintah oleh rakyat, sehingga tingkat keadilannya sangat tinggi. Ketiga, memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi. Karena itu Marfu Amin selalu menekankan pentingnya berpihak pada ekonomi nasional dalam konsepnya (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019)

Berdasarkan data di atas secara ringkas pemikiran pembangunan ekonomi KH.Ma'ruf Amin berdasar atas 3 gagasan besar, yaitu ekonomi keadilan, ekonomi keumatan dan ekonomi berkemandirian. Dalam konsep keadilan ekonomi Pancasila ada pada sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan sejalan dengan salah satu silabusnya. Selain itu, cita-cita ekonomi keadilan adalah untuk meminimalkan bahkan menghilangkan kemiskinan, dan ketika disajikan dalam keadaan kurva saat ini, kurva tersebut akan menjadi kurva piramidal ke arah kurva belah ketupat, mengarah ke pegunungan wayang. juga akan Dalam keadilan ekonomi

KH. Ma'ruf Amin, itu harus didasarkan pada nilai-nilai agama, dan moralitas adalah faktor kunci dalam pelaksanaannya.

Berikutnya adalah ekonomi kerakyatan, atau konsep yang disebut juga dengan ekonomi kerakyatan. Konsep ini hampir sama dengan yang ditekankan oleh seorang pengusaha Indonesia (Moh. Hatta) dalam semangat pembangunan rakyat. Idenya adalah untuk mencoba mengurangi kesenjangan ketegangan (miskin dan kaya) yang muncul. Tetapi untuk mencapainya, kita harus menekankan semangat gotong royong, kerja sama, memajukan persatuan dan demokrasi ekonomi. Konsep terakhir adalah ekonomi mandiri. Semangat swasembada ini sangat penting mengingat Indonesia sendiri telah melewati masa-masa sulit akibat bertahun-tahun dijajah asing. Ini juga harus meringankan konsentrasi kekayaan di kelompok minoritas/partai politik. Padahal hal itu sejalan dengan Islam yang tidak memperbolehkan praktik monopoli oleh individu atau kelompok. Itulah pentingnya bermitra dengan perusahaan besar dan kecil serta mendorong mereka untuk lebih kompetitif agar perusahaan yang ada dapat tumbuh dan bersaing tanpa diserang oleh pihak asing.

Namun, untuk mendukung semua itu diperlukan peran pemerintah yang memperkuat konsep-konsep tersebut. Memberikan akses permodalan yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya serta meningkatkan kemampuan dan keterampilannya untuk mendukung tata kelola perusahaan guna mencapai keuntungan yang lebih besar, dan akses pasar untuk memungkinkan perluasan produk dan layanan. upaya untuk melakukannya dapat diterima secara lebih luas. Jika semua ini tercapai, imbalan dari komunitas hanya akan meningkat (Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas, 2019).

### **Pemikiran Pembangunan Ekonomi Adiwarmar Karim**

Adiwarmar Azwar Karim lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1963. Adiwarmar atau Adi (panggilan akrab) merupakan cerminan seorang pemuda yang memiliki "hobi" belajar. Ia menempuh pendidikan tingkat sarjana di dua universitas berbeda, IPB dan UI. Beliau memperoleh gelar Insinyur pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun 1988 Adiwarmar berhasil menyelesaikan studinya di European University, Belgia dan meraih gelar M.B.A. setelah itu menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989. Tiga tahun kemudian, 1992, Adiwarmar juga meraih gelar keduanya Gelar master di Universitas Boston, AS dengan gelar M.A.E.P. Selain itu, ia juga terlibat sebagai *Visiting Research Associate di Oxford Centre for Islamic Studies*.

Menurut Adiwarmar Karim, ekonomi Islam diibaratkan satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap (Karim, Adiwarmar A., 2001). Adiwarmar mengakui hal ini dan menawarkan pemahaman ekonomi Islam yang dibangun di atas nilai-nilai Islam universal. Nilai-nilai yang dia maksud adalah tauhid (kesatuan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwah (nubuatan), dan ma'ad (kembali). Singkatnya, keterkaitan prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Adiwarmar menawarkan pemahaman ekonomi Islam yang dibangun di atas nilai-nilai Islam universal. Nilai-nilai yang dia maksud adalah tauhid (kesatuan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwah (nubuatan), dan ma'ad (return). Singkatnya, keterkaitan prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.



a. Prinsip tauhid (keesaan)

Tauhid berarti Pencipta Pemilik dan Pemelihara segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, Tuhan Yang Maha Adil dan Tuhan Yang Maha Pemersatu yang berkuasa atas segalanya. Menyangkal nilai tauhid bisa membuat orang menjadi megalomania, merasa bahwa uang bisa melakukan apa saja. Konsep keesaan Tuhan dengan demikian memberikan arahan kepada entitas ekonomi bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan bahwa manusia hanya sebagai wali. Oleh karena itu, semua kegiatan ekonomi memiliki sistem akuntabilitas.

b. Prinsip 'adl (keadilan)

Prinsip keadilan menjadi dasar untuk memastikan bahwa semua kebijakan dalam kegiatan ekonomi dirancang untuk mempengaruhi secara positif pertumbuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di semua lapisan masyarakat. Prinsip keadilan mencerminkan pemerataan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan, dan antara pendapatan si kaya dan si miskin.

c. Prinsip khilafah (pemerintahan)

Namun untuk mewujudkan prinsip keadilan, diperlukan campur tangan khilafah (pemerintah) sebagai regulator. Contoh terbaik penerapan sistem regulasi yang dipimpin pemerintah dalam urusan ekonomi mungkin berkaitan dengan struktur sosial ekonomi pada masa Nabi (nubuwwah), khususnya periode era Madinah.

d. Prinsip nubuwah (kenabian)

Prinsip Nubuwwah disini mengandung pengertian bahwa konsep ekonomi Islam adalah konsep untuk manusia, bukan malaikat, dan bisa dijalankan oleh manusia, bukan malaikat. Nubuwwah adalah jawaban dari kebutuhan tersebut sebagaimana Nabi mencontohkan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang sukses di akhirat.

e. Prinsip ma'ad (return)

Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi yang diselenggarakan secara sistematis oleh sistem ini tidak lain adalah maksimalisasi keuntungan (*ma'ad return*) tidak hanya dengan menggunakan kriteria material tetapi juga aspek religius. Untuk menciptakan perekonomian yang kuat, tentunya pelakunya harus memiliki motif yang kuat. Oleh karena itu, ekonomi Islam adalah ekonomi mencari keuntungan. Namun, dalam ekonomi Islam, keuntungan bukan hanya keuntungan dunia, tetapi juga keuntungan akhirat (Karim, Adiwarmar A., 2007).

Setelah membicarakan tentang landasan ekonomi Islam, maka kini masalah tiangnya yang meliputi: *multiple ownership*, *freedom to act*, serta *social justice*. Islam mengenal adanya harta pribadi, harta bersama (shirkah) dan harta negara. Ini sangat berbeda dengan konsepsi kapitalis klasik tentang kepemilikan pribadi saja dan konsepsi sosialis tentang pembagian negara saja.

*Multiple ownership* (kepemilikan multi jenis) berasal dari prinsip tauhid bahwa manusia sebagai wali di muka bumi diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola sumber daya yang ada padanya. meningkatkan. Namun, kebebasan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya dibatasi oleh tujuan bersama untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata (*return ma'ad*). Sedangkan proposisi kebebasan bertindak (*freedom to act*)

memberikan motivasi kepada pelaku ekonomi dalam berbisnis, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun pemerintah sebagai regulator, sebagaimana yang dipraktikkan pada masa Nabi.

Selain prinsip di atas, terciptanya sistem ekonomi Islam juga memerlukan tatanan normatif atau hukum yang berfungsi sebagai payung (atap) dan menjamin keberlangsungannya. Sistem norma atau hukum ini oleh Adiwarmarman Anwar Karim disebut etika ekonomi Islam.

### **Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmarman Azwar Karim**

#### **1. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan**

Pokok pikiran KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmarman Azwar Karim berpijak pada pandangannya bahwa mewujudkan masyarakat yang berkeadilan adalah cita-cita nasional. Keduanya berkeyakinan bahwa tujuan pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tapi KH. Ma'ruf Amin memisahkan keduanya. KH. Ma'ruf Amin tidak hanya bercita-cita pada keadilan, tetapi juga memandang keadilan sebagai suatu konsep dalam melakukan pembangunan, yang ia sebut dengan konsep ekonomi berkeadilan.

#### **2. Pemerataan sosial menjadi tolak ukur dalam pembangunan**

KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmarman Azwar Karim memiliki pandangan yang sama bahwa pemerataan kekayaan sangat penting dan menjadi salah satu kriteria bagi masyarakat. Kedua, jika di masa lalu banyak orang miskin, atau jika jumlah orang miskin berkurang menjadi nol atau (sedikit), dapat dikatakan bahwa pembangunan negara dapat dicapai dengan meratakan struktur sosial. Keduanya juga sepakat bahwa Islam sangat ketat tentang keadilan, sehingga hal ini harus dilakukan untuk meredakan ketegangan antara si kaya dan si miskin.

Namun, cara untuk mencapai keadilan berbeda dari kedua perspektif tersebut. Adiwarmarman Azwar Karim berkeyakinan Islam menghormati dan melindungi hak penjual dan pembeli dalam menetapkan harga untuk mencapai keadilan, hak untuk menciptakan persaingan yang sehat dan monopoli. Dan meskipun regulasi persaingan ini diharapkan memungkinkan pemerintah untuk melindungi hak orang lain tanpa campur tangan pemerintah, pemerintah justru melindungi kepentingan rakyat, dan tidak perlu mengoordinasikan keduanya. KH. Ma'ruf Amin di sisi lain percaya bahwa untuk mencapai keadilan, kita membutuhkan gagasan ekonomi untuk kemaslahatan rakyat (rakyat). Telah melakukan.

#### **3. Peran negara dalam mendukung pembangunan ekonomi**

Menurut KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmarman Azwar Karim, peran negara (pemerintah) sangat penting dalam mencapai pembangunan ekonomi. Kebijakan yang diumumkan oleh negara nantinya akan mempengaruhi kemudahan dan kesulitan pencapaian pembangunan ekonomi. Namun, dalam peran lain yang harus ditekankan oleh negara, kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda. Adiwarmarman Azwar Karim lebih menekankan peran negara dalam kebijakan moneter.

Dalam kebijakan kebijakan moneter ini, Adiwarmar mengacu pada kebijakan yang diterapkan oleh Nabi dan Krafaul Rasyidin yang dilaksanakan tanpa adanya bunga. Perekonomian pada masa Nabi dan Krafaul Rasyidin bukanlah perekonomian terbelakang, melainkan perekonomian progresif, meskipun hanya mengenal barter. Dan perekonomian saat itu tidak bertumpu pada sumber daya alam, tetapi sudah pada perdagangan dengan uang sebagai alat tukar. KH. Ma'ruf Amin berfokus pada pembentukan dan perhatian terhadap kelembagaan ekonomi, penghimpunan dana, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta peningkatan dukungan untuk perluasan akses pasar (ekonomi) dengan menggunakan demokrasi ekonomi.

4. Moral sebagai pembangunan ekonomi

Pandangan KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmar Azwar Karim sangat diperlukan secara moral untuk mencapai pembangunan ekonomi. Keduanya sepakat bahwa jika individu ingin berkembang secara adil, mereka harus memperkuat moralnya (spirit religius/tauhid) untuk menghindari perilaku *moral hazard*. Mereka yang berkepentingan percaya bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan bahwa manusia hanyalah wali. Oleh karena itu, semua kegiatan ekonomi memiliki sistem akuntabilitas.

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas dalam memahami pemikiran pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmar Azwar Karim, maka penulis menyajikan perbandingan pemikiran kedua tokoh dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel.1** Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmar Azwar Karim

Keterangan	KH. Ma'ruf Amin	Adiwarmar Azwar Karim
Objek dan subjek pembangunan	Manusia, lingkungan dan spiritual	Manusia, lingkungan dan spiritual
Landasan pembangunan	Moral, kemanusiaan, keadilan sosial, kemitraan, persatuan, demokrasi dan kemandirian.	tauhid, keadilan, pemerintahan, nubuwah, return.
Indikator pembangunan	Pemerataan kekayaan, padat karya, budaya menabung dan investasi serta ekspor lebih besar dari impor	intervensi khilafah (pemerintah), keadilan sosial, kebijakan moneter
Tujuan pembangunan	Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia	Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia

**Relevansi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmar Azwar Karim Terhadap Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia**

Setelah penulis memaparkan pemikiran pembangunan ekonomi dalam pandangan KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarmar Azwar Karim dan persamaan dan

perbedaan pemikiran diantara kedua tokoh, selanjutnya dalam sub bab ini penulis akan memaparkan relevansi pemikiran pembangunan kedua tokoh tersebut dalam pembangunan ekonomi islam di Indonesia.

### **Relevansi pemikiran pembangunan ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin**

Berdasarkan landasan dan filosofi yang dibangun KH. Ma'ruf Amin menginginkan pemerataan pembangunan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berdikari (mandiri), mengikuti prinsip dasar bangsa Indonesia (Pancasila). Dalam hal ini, gagasan pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin dan pembangunan ekonomi Indonesia menggunakan prinsip dasar yang sama, yaitu Pancasila, sebagai landasan pembangunan. Dasar rumusan Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi KH. Ma'ruf Amin dan pembangunan Indonesia sejalan dan sangat erat kaitannya.

Cita-cita pembangunan berkeadilan yang digagas KH. Ma'ruf Amin bukan hanya untuk sebagian golongan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Marfu Amin juga berharap agar masyarakat Indonesia terangkat dari kemiskinan. Inilah alat KH. Ma'ruf Amin untuk pembangunan ekonomi berkeadilan melalui jaminan sosial, ZISWAF dan infrastruktur.

Di Indonesia, jaminan sosial juga tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945, yang juga diwujudkan dalam bentuk BPJS dan asuransi yang ada untuk rakyat Indonesia. Dalam instrumen ZISWAF, negara Indonesia juga telah membentuk lembaga BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya yang dikelola masyarakat sipil seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Arah pembangunan infrastruktur telah didukung oleh Peraturan Presiden nomor 56 Tahun 2018, dimana pada tanggal 20 Juli 2018 terdapat 227 proyek yang masuk dalam PSN (64 pembangunan jalan tol, 57 pembangunan bendungan dan jaringan irigasi serta pembangunan lainnya).

Pembangunan dilakukan melalui akar rumput melalui konsep komunitas atau dalam Moh. Hatta dikenal dengan konsep demokrasi. Hal ini mulai digencarkan oleh Negara Indonesia melalui pengembangan koperasi dan kepedulian sosial. Salah satu instrumen tersebut adalah berbasis koperasi. Hal ini terlihat dari jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 127.124 unit dengan 25.098.807 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, kepedulian sosial juga dilakukan melalui lembaga amil zakat yang telah dijelaskan di atas.

Selanjutnya, UMKM berdaya merupakan gagasan KH. Ma'ruf Amin melalui konsep ekonomi mandiri. Hal ini didorong dengan kemudahan kredit usaha rakyat dan pemberian akses permodalan, pengembangan kompetensi dan akses pasar diharapkan mampu mengembangkan UMKM rakyat yang mandiri. Selain itu, pemerintah memperkuat UMKM dengan berbagai bantuan, dimana hingga 31 Juli 2021 tercatat 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program tersebut dengan menyerap dana sebesar 285,17 triliun.

### **Relevansi pemikiran pembangunan ekonomi Islam Adiwarmar Azwar Karim**

Pemikiran pembangunan ekonomi Islam Adiwarmar Azwar Karim seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Garis besar pemikirannya meliputi penekanan pada

prinsip tauhid (kesatuan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian) dan ma'ad (return). Jika dilihat secara fundamental pemikirannya cukup relevan dengan konsep pembangunan ekonomi pancasila di Indonesia.

Merujuk pada pemikiran Adiwarmar Azwar Karim yang menekankan prinsip tauhid sebagai kunci pembangunan, hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi Pancasila di Indonesia yang menggunakan prinsip ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini spiritualitas menjadi landasan yang harus dimiliki oleh warga negara ketika menginginkan pembangunan, karena melalui pembangunan akhlak yang baik akan dapat terwujud pemerataan pembangunan. Lebih lanjut, Adiwarmar Anwar Karim menekankan prinsip keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia, ekonomi Pancasila juga menjadikan kemanusiaan dan demokrasi sebagai basis ideal. Hal ini terlihat dalam UUD 1945 (UUD 1945) pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Jaminan kebebasan bekerja, jaminan sosial dan pemberdayaan kaum lemah merupakan hal yang sangat penting untuk menegakkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi salah satunya melalui pemerataan yang menekankan pada perubahan struktur masyarakat sehingga kesenjangan antara si miskin dan si kaya dapat dihilangkan.

Tujuan pembangunan ekonomi Adiwarmar Azwar Karim adalah kemakmuran dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dalam hal pembangunan ekonomi, Indonesia juga memiliki tujuan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam sila ke-5 Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dari segi tujuan, pemikiran Adiwarmar Azwar Karim sangat relevan dengan cita-cita pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain sila ke-5 Pancasila, tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia juga tertuang dalam visi dan arah pembangunan jangka panjang (PJP) tahun 2005-2025, pada bagian 2 dijelaskan visi pembangunan ekonomi itu sendiri yaitu: terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara riil. memperluas peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip ekonomi yang mendukung persaingan sehat dan berkeadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan nasional dengan mengandalkan kemampuan dan potensi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari dua pemikiran tentang pembangunan ekonomi Islam diketahui bahwa pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mengukur tingkat kesejahteraan di dunia, tetapi jauh lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kesejahteraan di akhirat nanti. Konsep yang dikembangkan kedua pemikir ini lebih mengarah pada pemberdayaan sumber daya alam secara efisien dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Keadilan sebagai orientasi yang dibangun sebagai cita-cita pembangunan ekonomi dilakukan melalui pemerataan untuk mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan, serta peran negara melalui kebijakan dan pendidikan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selanjutnya mengenai pemikiran pembangunan ekonomi Islam yang digagas oleh KH. Ma'ruf Amin memiliki tiga pandangan (ekonomi keadilan, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kemandirian). Selain upaya memberikan akses permodalan, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, serta memperluas akses pasar. Sementara itu, Adiwarmar Azwar Karim memandang pembangunan ekonomi Islam menekankan prinsip tauhid sebagai kunci pembangunan. Lebih lanjut beliau menekankan asas keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mendukung persaingan yang sehat dan berkeadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan dan potensi bangsa. Namun, penekanan dan metode yang digunakan oleh kedua karakter tersebut berbeda. Secara substansi, pemikiran kedua tokoh tersebut relevan dengan cita-cita pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, pembangunan dilakukan berdasarkan landasan dasar negara, yaitu Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almizan, A. 2016. Pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 1(2). 203-222.
- Euis, Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Firdausi, N. A., & Herianingrum, S. 2020. Prinsip Ekonomi Islam Dan Implementasinya Dalam Keuangan Rumah Sakit (Studi Kasus Pada Rs Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 7(2). 207.
- Firda Zulfa. 2015. Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmar Azwar Karim. *el-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*. 1(2). 17-30.
- Hasan, M., & Azis, M. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: Pustaka Taman Ilmu.
- Santi, M. 2019. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*. 7(01). 47-56.
- Kaelan, M. S. 2005. *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, A. A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. 2018. Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia.
- Mubyarto. 1998. *Reformasi sistem ekonomi: dari kapitalisme menuju ekonomi kerakyatan*. Aditya Media.
- Panggabean, Sahala, and Anwar Abbas. *Ma'ruf Amin Way*. 2019. Gramedia Pustaka Utama.
- Purba, Bonaraja, et al. 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sasono, Adi. 2008. *Rakyat bangkit bangun martabat*. Pustaka Alvabet.
- Tohir, Moh. 2014. *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan M. Umer Chapra*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.